



RAPOR TRIWULAN 4

Badan Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

2024

RAPOR KINERJA

Ranking: 19

Predikat SAKIP: A

Rata-Rata Nilai: 100.00%

Predikat: Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	150000 00	150000 00	100.00
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	38	38	100	884078 0010	609479 6037	68.94
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Percentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	100	319950 00	862410 0	26.95
4	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	100	249998 00	633200 0	25.33

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	1	1	100	345226 190	552964 850	160.17
6	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor	1	1	100	194997 500	994750 00	51.01
7	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100	100063 200	379500 00	37.93
8	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	1	100	420000 00	226839 60	54.01
9	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100	250000 000	100182 919	40.07
10	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	100	900000 0	155116 0	17.24
11	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	100	216000 000	571557 84	26.46

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
12	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	1	100	168000 00	368995 5	21.96
13	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	100	228000 000	106590 000	46.75
14	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	1	1	100	105456 000	162440 00	15.40
15	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	1	1	100	105456 000	162240 00	15.38
16	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Operator Komputer	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer	1	1	100	527280 00	162240 00	30.77
17	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi	1	1	100	105456 000	243360 00	23.08
18	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana	1	1	100	630000 00	572000 00	90.79

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
19	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terverifikasinya DPA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah DPA Perubahan PD yang terverifikasi	56	56	100	105740 000	131800 00	12.46
20	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Disepakatinya Upaya Untuk Mencapai Sebuah Tujuan Melalui Rapat Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Hasil Rapat Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	1	100	261275 300	136953 00	5.24
21	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD)	Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD)	1	1	100	668090 00	811200 0	12.14
22	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	1	1	100	253427 300	100719 000	39.74
23	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlayani permohonan SP2D Perangkat Daerah	Persentase permohonan SP2D yang terlayani	25	25	100	319981 500	327738 000	102.42
24	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	1	1	100	133454 000	134120 00	10.05
25	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	100	563450 00	360450 00	63.97

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
26	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi	% persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu	25	25	100	454693 967978	480326 84517	10.56
27	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1	100	211102 56448	129999 99800	61.58
28	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersertifikasinya bidang tanah BMD	Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat	1	1	100	900000 000	544923 000	60.55
29	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah	1	1	100	175000 000	284102 200	162.34
30	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlayaninya Permohonan Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Permohonan Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang terlayani	25	25	100	730000 000	457999 510	62.74
31	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akurat	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	1	100	401000 000	905750 00	22.59
32	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	600000 0	547500 0	91.25

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
33	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	600000 0	600000 0	100.00
34	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	120000 00	120000 00	100.00
35	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	899900 0	499500 0	55.51
36	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	280900 00	154965 00	55.17
37	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	17	17	100	168000 00	291384 00	173.44
38	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	100	205224 800	536250 00	26.13
39	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	100	204959 600	105250 00	5.14

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
40	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terverifikasi RKA-SKPD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	56	56	100	244792 500	932875 00	38.11
41	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1	1	100	337350 000	251912 000	74.67
42	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	1	1	100	562074 900	194512 000	34.61
43	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Materi Muatan Regulasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Materi Muatan Regulasi Anggaran	1	1	100	242649 900	774250 00	31.91
44	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Jumlah Dokumen Buku LKPD	1	1	100	127592 500	300000 00	23.51
45	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	4	100	175937 500	124480 000	70.75
46	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terevaluasinya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terevaluasi	1	1	100	168500 00	164900 00	97.86

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
47	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang	56	56	100	450000 00	259000 00	57.56
48	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terinventarisasinya Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Hasil Inventarisasi	1	1	100	410000 00	255000 00	62.20
49	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah	90	90	100	702498 00	201000 00	28.61
Rata-rata:								100.00		14.45

Rekomendasi:

Generated by E-SAKIP 2024